

Meneguhkan Peran

ORGANISASI
MASYARAKAT
SIPIL



LAPORAN TAHUNAN 2010



Daftar Isi

Kata Pengantar Dewan Pembina.....	3
Kata Pengantar Direktur Eksekutif.....	5
Masyarakat Sipil Menyatukan Langkah untuk Mengawal Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	7
Mengkaji Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil.....	10
Memahami TKLD dan Sumbangan Kerja-Kerja OMS terhadap Cita-Cita Kabupaten: Pembelajaran Pengembangan Kapasitas OMS Mitra ACCESS Fase II di Kabupaten Lombok Tengah.....	12
Memperkuat KAMUKI Papua Barat.....	14
Membangun Kemandirian Lembaga melalui Penggalangan Dana Publik.....	16
Mengembangkan Unit Usaha untuk Mendukung Gerakan Anti Korupsi Kisah dari <i>Malang Corruption Watch (MCW)</i>	18
Menguatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pertautan (<i>Engagement</i>) Konstruktif dan Tata Pemerintahan yang Berpusat pada Warga.....	20



YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergiat mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis & mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

Jl. Pedati No.20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, Indonesia

Telpon: 021-8191623 Faks: 021-85905262 Email: yappika@indosat.net.id Website: www.yappika.or.id

Kata Pengantar

Dwi Astuti - Ketua Pembina

Demokrasi tidak berada dan bergerak dalam ruang kosong, ia merupakan realitas kongkrit dan dinamis. Bentuk demokrasi seperti apa yang diinginkan bukanlah bergantung pada semata-mata sistem demokrasi itu sendiri, tetapi bagaimana manusia-manusianya dapat menerima dan beradaptasi dengan sistem demokrasi yang diciptakannya sendiri.



Demokratisasi adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti. Ia merupakan keniscayaan yang lahir dari relaitas masyarakat dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Karena itu demokrasi memang tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun, ia menjadi keharusan sejarah. Gelombang demokratisasi yang menyapu di seluruh negara, dimulai dari negara-negara Eropa Timur, Asia, Amerika Latin, dan akhir-akhir ini dialami negara-negara Timur Tengah, menunjukkan fenomena yang selalu bergerak dan dinamis.

Demikian halnya di Indonesia, gelombang demokratisasi meskipun terkesan lambat bahkan stagnan, namun secara pasti ia merambah ke seluruh pelosok tanah air. Kata demokrasi dan reformasi bukan lagi milik orang kota, di desa-desa terminologi tersebut telah mengisi memori masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan. Masyarakat tidak lagi belajar demokrasi dari sekolah-sekolah atau buku-buku, media massa baik elektronik dan cetak memberikan kontribusi terbesar dalam mengisi dan membentuk persepsi masyarakat tentang demokrasi.

Berubahnya sistem ketatanegaraan kita sejak reformasi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tumbuhnya partisipasi politik warga negara baik di

kota maupun pedesaan. Di mulai dengan pertumbuhan jumlah Parpol yang makin banyak, penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada langsung, kebebasan berekspresi baik melalui media massa maupun dengan penuntutan langsung melalui demonstrasi serta pembuatan perisi, semua itu telah menciptakan perubahan perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia.

Perubahan-perubahan tersebut meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan bahkan berdampak negatif merupakan kenyataan yang pasti ada. Karena demokrasi adalah proses maka selain kemajuan yang diperoleh, juga biaya sosial-politik harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi. Kini setelah lebih sepuluh tahun Indonesia memasuki fase transisi demokrasi, banyak orang sudah mulai frustrasi melihat berbagai persoalan dan kekalutan yang terjadi pada periode reformasi ini. Banyak yang mengatakan demokrasi sudah kebablasan, demokrasi tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan masih banyak lagi hujatan terhadap proses demokrasi yang kini masih berlangsung.

Mengapa kekecewaan dan rasa frustrasi masyarakat terhadap proses demokrasi terjadi? Hal yang utama adalah banyak orang menginginkan dan berharap dari demokrasi namun mereka belum

memahami “proses demokrasi” itu sendiri. Masyarakat belum memahami bahwa demokrasi itu adalah proses pembelajaran diri bagi setiap orang, keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Demokrasi tidak berada dan bergerak dalam ruang kosong, ia merupakan realitas kongkrit dan dinamis. Bentuk demokrasi seperti apa yang diinginkan bukanlah bergantung pada semata-mata sistem demokrasi itu sendiri, tetapi bagaimana manusia-manusianya dapat menerima dan beradaptasi dengan sistem demokrasi yang diciptakannya sendiri. Tanpa ada kehendak semua orang untuk tunduk dan menerima “rule of law” dari sistem demokrasi maka demokrasi tidak memiliki arti apapun.

Sudah banyak contoh yang kita hadapi sepanjang reformasi, berbagai produk hukum dan peraturan dibuat namun tetap dilanggar. Konsitusi kita (UUD 1945) sudah empat kali diamandemen namun tetap disimpangi oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, seolah-olah konstitusi tersebut tidak berlaku. Akibatnya, praktek KKN hingga kini masih tetap berlanjut, pelanggaran HAM tetap terjadi, kemiskinan dan kesenjangan semakin bertambah. Jadi sebagus apapun juga sistem dan perangkat demokrasi yang dibangun sepanjang manusia-manusianya tidak berkehendak tunduk pada sistem tersebut maka sudah pasti demokrasi terhambat.

Oleh karena demokrasi pada intinya adalah proses belajar dan pembentukan

budaya baru dalam masyarakat maka peranan pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat sipil menjadi sangat penting. Di sinilah kehadiran program-program YAPPIKA di berbagai wilayah memiliki arti strategis untuk penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam pembelajaran demokrasi. Pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat sipil tersebut diharapkan dapat membentuk budaya demokrasi yang lebih baik. Persoalan kritis yang kita hadapi saat ini adalah pembentukan kelembagaan demokrasi tanpa dibarengi dengan pembentukan budaya demokrasi. Itu sebabnya suasana demokrasi yang dibangun lebih banyak bernuansa “amarah”, “dendam” dan “amuk” massa terhadap lingkungan sekitarnya. Tentu saja bila suasana membangun demokrasi ini terus dibiarkan yang akan terjadi adalah demokrasi akan menemui jalan buntu dan kegagalan. Diharapkan program-program yang telah diselenggarakan YAPPIKA dapat memberikan kontribusi dalam menyelamatkan transisi demokrasi di Indonesia.

Terima kasih atas kerjasama yang baik seluruh mitra YAPPIKA sehingga kerja keras menciptakan peluang dan merajut titik-titik demokrasi bisa dilakukan dengan baik di tahun 2010. Ke depan, tantangan semakin besar. Semoga pengalaman di tahun 2010 dapat menjadi bekal semangat bagi kita semua dalam menghadapi tantangan tersebut. ■

Kata Pengantar

Fransisca Fitri - Direktur Eksekutif

YAPPIKA aktif dalam menguatkan kapasitas para aktivis OMS di daerah agar mereka tumbuh menjadi 'intelektual' yang aktif mengekstraksi pengalaman empiriknya menjadi pengetahuan baru.



Di usia yang ke 20 tahun ini, YAPPIKA semakin meneguhkan diri pada penguatan peran masyarakat sipil dalam tata pemerintahan yang demokratis di tingkat nasional maupun lokal. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis ini mensyaratkan kapasitas tinggi dan cara pandang baru dari berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS). Laporan tahunan ini memuat kerja-kerja YAPPIKA dalam penguatan peran masyarakat sipil yang dilakukan sepanjang Januari – Desember 2010. Dalam refleksi atas berbagai inisiatif tersebut, YAPPIKA menempatkan keseluruhan kerja dalam satu tahun lalu dalam tiga agenda penguatan peran masyarakat sipil.

Pertama, kerja-kerja untuk menciptakan ruang kreatif bagi OMS guna menghasilkan pengetahuan serta menciptakan ruang untuk memunculkan kesadaran kritis. Keberadaan OMS tidak hanya ditujukan untuk melakukan aksi-aksi pemberdayaan warga dan perubahan kebijakan, namun juga untuk memproduksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman empirik organisasinya. Dalam kontribusi menciptakan ruang kreatif tersebut, tahun 2010 yang lalu, YAPPIKA bersama dengan jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dan berbagai organisasi

masyarakat sipil yang bekerja dalam isu pelayanan publik melakukan refleksi terkait peran-peran mendorong pelayanan publik yang adil dan berkualitas yang selama ini telah dijalankan. Pertemuan tersebut juga bertujuan untuk konsolidasi masyarakat sipil lintas sektoral guna mengawal pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Konsolidasi ini menghasilkan *road map* masyarakat sipil yang memuat orientasi gerakan dan agenda bersama untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan UU Pelayanan Publik. YAPPIKA juga bekerja sama dengan INCITEGov dari Filipina dalam upaya menyusun kurikulum pelatihan tentang *strategi constructive engagement* untuk reformasi tata pemerintahan. Kurikulum ini merupakan ekstraksi dari pengalaman advokasi masyarakat sipil di tiga negara, yaitu Filipina, Kamboja, dan Indonesia yang selanjutnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil. Sementara itu upaya menciptakan ruang-ruang untuk memunculkan kesadaran kritis masyarakat dilakukan YAPPIKA bersama dengan simpul MP3 Jabodetabek melalui diskusi-diskusi komunitas membahas peluang partisipasi warga yang dijamin dalam UU Pelayanan Publik. Kegiatan keaksaraan fungsional berbasis hak dasar pelayanan publik bagi para ibu buta aksara di Jakarta Utara menjadi upaya YAPPIKA

untuk menyemai benih kesadaran kritis atas hak dan peran perempuan sebagai warga negara.

Kedua, kerja-kerja untuk meningkatkan kapasitas OMS. Sebagai sistem pendukung masyarakat sipil, YAPPIKA aktif dalam menguatkan kapasitas para aktivis OMS di daerah agar mereka tumbuh menjadi 'intelektual' yang aktif mengekstraksi pengalaman empiriknya menjadi pengetahuan baru. Penguatan kapasitas yang dilakukan oleh YAPPIKA tahun lalu adalah pengembangan kapasitas tentang Tata Pemerintahan Lokal Demokratis bagi OMS mitra Program ACCESS Tahap II di Kabupaten Lombok Tengah dan peningkatan kapasitas riset dan kampanye dalam isu sumber daya alam kepada KAMUKI Community Foundation di Papua Barat. Selain itu, YAPPIKA bersama dengan tim inti Indeks Masyarakat Sipil (IMS) di 16 kabupaten wilayah kerja Program ACCESS II, berupaya menyebarluaskan hasil dan alat IMS untuk menguatkan peran masyarakat sipil dalam tata pemerintahan lokal demokratis. Kegiatan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dan stakeholder kuncinya dengan cara memperbincangkan kontribusi peran masyarakat sipil dikaitkan dengan perubahan konteks kabupaten terkini.

Ketiga, kerja-kerja untuk mengembangkan kapasitas organisasional OMS. Aspek tata kelola organisasi seringkali tidak menjadi faktor yang dipandang penting dalam menghasilkan kinerja organisasi. Peningkatan kemampuan SDM dalam ketrampilan-ketrampilan pengorganisasian atau advokasi yang seringkali dikejar dalam upaya menghasilkan output program. Sementara proses pembelajaran untuk refleksi dan evaluasi hanya dilakukan dalam siklus pendek kegiatan atau program. Melalui kegiatan peninjauan kapasitas kepada mitra *The Asia Foundation* (TAF) dalam Program CSIAP II, YAPPIKA berupaya untuk mengajak 21 OMS di berbagai kabupaten/kota untuk berefleksi atas kinerja organisasinya. Hal ini

dilakukan agar organisasi berkesempatan untuk menarik pembelajaran dalam siklus panjang, dengan cara mengaitkan kinerja organisasi dengan orientasi dan berbagai komponen organisasinya. Selain itu, analisis atas perubahan kinerja organisasi juga dikaitkan dengan konteks eksternal yang melingkupi organisasi, seperti konteks politik, kebebasan sipil dan hak dasar, sosial-ekonomi, sosial-budaya, hukum dan kebijakan, dan relasi baik dengan negara maupun sektor swasta. Proses refleksi dan evaluasi organisasi tersebut dilakukan secara partisipatif melibatkan berbagai struktur lembaga serta masyarakat dampingannya agar tercipta ruang diskusi yang cukup demokratis.

Secara eksternal, berbagai upaya dalam ketiga agenda tersebut dipengaruhi pula oleh perubahan konteks eksternal yang terus-menerus bergerak baik di tingkat lokal maupun nasional, dan bahkan tataran global. Setelah era demokratisasi pada 1998, Indonesia bergerak pada era desentralisasi. Dan saat ini konteks eksternal telah bergerak lagi ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang mendorong birokrasi pemerintah menjadi lebih terbuka, serta tingginya tuntutan publik secara langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah termasuk pelayanan publik yang berkualitas dan non diskriminatif. Akhir kata, dalam pandangan YAPPIKA, berubahnya konteks eksternal ini tentu perlu direspon secara berkesinambungan oleh OMS, terutama agar dirinya mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan peran sebagai masyarakat sipil. ■

Masyarakat Sipil Menyatukan Langkah untuk Mengawal Penyelenggaraan Pelayanan Publik



UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah berumur satu tahun sejak disahkan pada Juli 2009. Walaupun sudah disahkan dan dinyatakan berlaku sejak pengesahan tersebut, namun sampai bulan Agustus 2010, belum tampak tanda-tanda bahwa UU ini dijalankan oleh pemerintah. Aturan-aturan turunan yang dimandatkan UU Pelayanan Publik seperti Peraturan Pemerintah dan Perpres yang seharusnya sudah selesai setelah enam bulan pasca pengesahan UU belum disahkan. Bahkan sosialisasi oleh pemerintah yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada kalangan pemerintah sendiri (pusat maupun daerah), unit-unit pelayanan publik serta masyarakat sangat minim.

Padahal dari sisi substansi UU Pelayanan Publik memberikan ruang cukup luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari proses perencanaan, pengawasan implementasinya, monitoring dan evaluasi. Kelompok-kelompok masyarakat diberi ruang untuk membentuk lembaga pemantau pelayanan publik

dan terlibat dalam pembuatan standar pelayanan. Ruang-ruang partisipasi tersebut penting diketahui dan dipahami oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah maupun pihak swasta) serta masyarakat agar terjadi percepatan perbaikan pelayanan yang berbasis pada paradigma pemenuhan hak warga negara sesuai dengan semangat yang mendasari pembentukan UU ini.

Salah satu faktor yang turut menentukan efektivitas implementasi UU Pelayanan Publik dan kebijakan sektoral lainnya yang menjadi pijakan hukum bagi pelayanan publik adalah pengawasan yang intensif dan terkonsolidasi terutama yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. UU Pelayanan Publik adalah salah satu faktor penting yang akan menjadi dasar hukum untuk mendorong pelayanan hak dasar menjadi lebih baik. Tetapi undang-undang dengan substansi yang bagus tentu tidak serta merta akan menjawab seluruh persoalan pelayanan publik, jika berbagai institusi pemerintah yang seharusnya berfungsi, masih belum kondusif dalam penegakan UU ini. Perlu ada desakan agar Ombudsman Republik Indonesia

(ORI) sebagai lembaga pengawas bekerja secara optimal. Perlu ada upaya untuk mengubah paradigma dan perilaku institusi penyelenggara pelayanan publik. Perlu ada desakan agar jaminan dalam UU Pelayanan Publik mengenai pelayanan khusus bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus (rentan) benar-benar dijalankan. Begitu pula perlu ada kesadaran kritis agar publik aktif menuntut haknya seperti yang terakomodir dalam UU Pelayanan Publik dan kebijakan sektoral lainnya. Intinya, perlu ada gerakan yang visioner, masif dan terkonsolidasi untuk mengawal penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih adil dan berkualitas.

Dalam konteks pengawasan pelaksanaan UU Pelayanan Publik tersebut, jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dan jaringan pegiat pelayanan publik lainnya membangun orientasi gerakan dan agenda bersama untuk mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di masa datang. Konsolidasi gerakan ini dilakukan dalam sebuah lokakarya selama tiga hari di Ciloto, Jawa Barat pada tanggal 7 – 9 Agustus 2010. MP3 merupakan jaringan masyarakat sipil yang terbentuk pada awal tahun 2006 dan bergiat melakukan advokasi RUU Pelayanan Publik hingga kebijakan tersebut disahkan dalam lembaran negara sebagai UU No. 25 Tahun 2009.

Lokakarya konsolidasi masyarakat sipil tersebut menghasilkan peta jalan (*road map*) bagi masyarakat sipil untuk

mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, seluruh peserta berkomitmen untuk meneruskan konsolidasi gerakan tersebut dalam wadah jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) serta meluaskan jaringan MP3 yang semula memiliki 7 simpul wilayah menjadi 13 simpul wilayah. Simpul-simpul wilayah tersebut disepakati bersama dan melekat pada organisasi, serta memiliki seorang contact person. Simpul-simpul tersebut berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah – DIY, Jabotabek, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bandar Lampung dan Kalimantan Timur.

Semangat masyarakat sipil yang tumbuh untuk mengawal implementasi UU Pelayanan Publik adalah langkah awal yang baik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana merawat dan membiakkan semangat tersebut hingga mewujudkan dalam kerja-kerja pengawalan nyata. Dalam konteks Indonesia, kerja-kerja advokasi kebijakan memang memerlukan nafas yang panjang. Advokasi tidak dapat berhenti ketika sebuah kebijakan disahkan pemerintah, namun harus ditindaklanjuti dengan advokasi pengawalan implementasinya guna memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya organisasi masyarakat sipil harus tetap kuat dan gerakannya terkonsolidasi. ■

Beberapa contoh ruang partisipasi masyarakat dalam UU Pelayanan Publik:

Pasal 20

- Ayat (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- Ayat (2) dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Pasal 39

- Ayat (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
- Ayat (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.

Ini adalah kolaborasi yang saling mengisi dan saling memberi semangat antara para akademisi dan teman-teman yang memberi perhatian penuh terhadap peningkatan pelayanan publik melalui kerja-kerja advokasi RUU Pelayanan Publik yang dilakukan oleh jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3). Bagi saya, semua kegiatan bersama MP3 mengesankan, karena kegiatan ini sangat sistematis dan diupayakan dengan sangat gigih. Ini juga yang membuat saya sering merasa menyesal ketika terpaksa berhalangan dalam suatu kegiatan.

Pelajaran penting dari peran yang saling mengisi tadi adalah makin terasanya kebutuhan untuk saling mengisi di antara beberapa elemen dalam masyarakat sipil untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Para akademisi, selain mendapat amunisi penambah semangat, juga mendapat dukungan informasi empiris dari teman-teman aktivis di lapangan. Di sisi lain, aspirasi dan informasi yang dibawa oleh teman-teman ke forum diskusi, mendapat penajaman dan kerangka yang sesuai kaidah akademis. Sementara ke luar, baik ke publik maupun ke pihak pemerintah dan legislatif, semuanya bersuara nyaris seirama.

Kolaborasi “semi permanen” seperti ini jarang kita temukan. Karena itu, ia perlu menjadi model bagi elemen-elemen bangsa yang lain. Ke dalam, kolaborasi ini tentu saja penting dilanjutkan, karena tugas belum selesai. Undang-undang yang disahkan tahun 2009 itu (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik), ternyata menghadapi masalah berikutnya yang tidak kalah penting, yakni tersendat di tahap implementasi. Padahal, UU ini sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata karena ia akan memberi kemudahan dalam mendapatkan hak sebagai warga negara untuk menikmati pelayanan publik dari aparat negara dan pemerintahan.

Andrinof A. Chaniago, Akademisi FISIP UI dan anggota tim ahli MP3

Mengkaji Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil



Organisasi adalah sebuah entitas yang dinamis. Ia mempunyai tujuan yang menjadi dasar pembentukan organisasi. Perjalanan sebuah organisasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, diantaranya adalah orang-orang yang ada di dalamnya, sistem-sistem, patokan-patokan kerja, struktur, proses-proses serta budaya organisasi. Semua unsur tersebut saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap kinerja. Pencapaian kinerja organisasi pun tentunya dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor eksternal. Refleksi atas keseluruhan dinamika tersebut penting dilakukan oleh sebuah organisasi secara terus menerus, untuk memperoleh pembelajaran berharga guna mengkaji seberapa besar sumbangan terhadap tujuan organisasi, apakah perjalanan organisasi masih pada koridor tujuan organisasi, atau mungkin diperlukan peninjauan ulang terhadap tujuan organisasi guna menyesuaikan dengan dinamika terkini.

YAPPIKA adalah organisasi yang meyakini bahwa individu-individu yang terorganisir mampu memberikan sumbangan yang efektif pada perubahan sosial yang lebih baik dengan cara-cara yang demokratis.

Oleh karenanya, dinamika organisasi seperti tersebut di atas menjadi perhatian penting dalam perjalanan YAPPIKA untuk mendukung organisasi yang sehat, baik dalam praktek-praktek internal maupun pendekatan-pendekatan program dan komunikasi dengan para mitra sesama organisasi masyarakat sipil. Salah satu perhatian diwujudkan dengan mengkaji, mempraktekkan, mengadaptasi dan mempromosikan alat-alat pengkajian kapasitas organisasi seperti *Organizational Capacity Assessment (OCA)* yang dikembangkan oleh INPI-PACT dan ACCESS, Transparansi dan Akuntabilitas NGO (TANGO) oleh Yayasan TIFA dan *Organizational Development Snapshot Tool (ODST)* oleh ACCESS.

Belajar dari pengalaman cukup panjang menerapkan beberapa alat tersebut, pada tahun 2009 – 2010, YAPPIKA mengembangkan alat pengkajian kapasitas organisasi yang diberi nama *Organisational Capacity Performance Assessment Tool (OCPAT)*. Alat ini merupakan hasil adaptasi dari OCA dan ODST yang memuat pengkajian kapasitas organisasi secara kualitatif dan kuantitatif serta bersifat

pengkajian mandiri (*self assessment*). Alat ini pada akhir tahun 2009, telah diterapkan untuk mengkaji kapasitas 22 organisasi mitra *the Asia Foundation* pada program Prakarsa Masyarakat Sipil dalam upaya Pengentasan Kemiskinan atau *Civil Society Initiative Against Poverty* (CSIAP) Phase II.

Pada akhir tahun 2010, YAPPIKA melanjutkan pengembangan alat ini untuk melakukan pengkajian ulang terhadap mitra CSIAP II - *the Asia Foundation* guna melihat perkembangan kapasitas kelembagaan para mitra serta dampak atau kemanfaatan program yang dilakukannya bagi kelompok target masyarakat di wilayah kerja yang bersangkutan. Proses pengkajian ulang dilakukan pada awal tahun 2011. Pada pengkajian ulang ini, YAPPIKA melengkapi OCPAT dengan alat pengkaji dampak program yang khusus dikembangkan

untuk CSIAP II. Alat tersebut diberi nama *Beneficiary Assessment Snapshot Tool* (BAST). Hasil BAST menjadi salah satu sumber informasi untuk mengkaji kinerja organisasi mitra yang dipotret melalui proses pengkajian menggunakan OCPAT.

Semoga proses dan hasil pengkajian yang telah dilakukan dapat menyumbang kepada meningkatnya kesehatan kelembagaan para mitra CSIAP II di masa datang sehingga mendukung kiprah mereka dalam proese pembangunan yang demokratis. Penghargaan yang tinggi perlu YAPPIKA sampaikan kepada para mitra yang telah bersedia bekerja sama dalam proses pengkajian tersebut, yang juga merupakan bukti bahwa mereka siap dan menyiapkan diri untuk tumbuh menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel. ■

Tantangan demokrasi dan tata kelola organisasi yang kian kompleks membuat organisasi non pemerintah harus siap menjadi etalase lembaga publik. Kiprah YAPPIKA selama ini berada di garda depan kelompok NGOs yang mempraktekkan budaya transparansi publik.

(Fajar Riza Ulhaq, Direktur Eksekutif Maarif Institute)



Memahami TKLD dan Sumbangan Kerja-Kerja OMS terhadap Cita-Cita Kabupaten: Pembelajaran Pengembangan Kapasitas OMS Mitra ACCESS Fase II di Kabupaten Lombok Tengah



Mulai tahun 2008, YAPPIKA terlibat dalam program *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) fase II, yaitu sebuah program inisiatif pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia melalui *the Australian Agency for International Development* (AusAID). Dalam program ini, YAPPIKA menjadi salah satu mitra strategis yang diantaranya berperan melayani kebutuhan peningkatan kapasitas OMS mitra ACCESS dalam hal advokasi kebijakan, pengembangan tata kelola kelembagaan, kampanye publik untuk mendukung advokasi dan pembelajaran program.

Pada November 2010, Yappika melakukan kegiatan pengembangan kapasitas tentang pembelajaran program bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mitra ACCESS Fase II di Lombok Tengah dengan tema “Pembelajaran Tata Kepemerintahan Lokal Demokratis (TKLD) dalam Lingkup Organisasi Mitra ACCESS”. Kegiatan dikemas dalam bentuk pertemuan reflektif selama empat hari yang diikuti oleh ASSPUK, Berugak Dese dan Mareje Bonga. Refleksi diarahkan untuk menarik pembelajaran dari setiap kerja yang telah dilakukan mitra, baik yang berasal dari inisiatif proaktif organisasi maupun program yang didukung oleh ACCESS, dikaitkan dengan cita-cita perubahan

di kabupaten. Cita-cita perubahan kabupaten adalah rumusan kondisi kabupaten yang diharapkan terwujud pada lima tahun yang akan datang (tahun 2014) oleh kontribusi dari seluruh aktor perubahan kabupaten, yaitu mulai dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah, sektor pasar sampai tingkat individu-individu. Cita-cita perubahan tersebut dirumuskan bersama-sama pada tahun 2009 oleh multi pihak yang berasal dari kalangan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, media massa, perempuan, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kegiatan pengembangan kapasitas tersebut dilakukan dalam tiga bagian; pertama, refleksi kinerja organisasi dikaitkan dengan komponen internal organisasi yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Kedua, refleksi terhadap kontribusi capaian program mitra ACCESS dikaitkan dengan cita-cita perubahan di tingkat kabupaten. Ketiga, praktek menggunakan Indeks Masyarakat Sipil (IMS) dalam merefleksikan pencapaian TKLD. Materi pendukung lainnya juga diberikan oleh Yappika diantaranya konsep desentralisasi, karakter TKLD, serta pengelolaan pengetahuan.

Secara umum, kegiatan pengembangan kapasitas ini berhasil menarik minat dan antusiasme para peserta. Refleksi cukup

dalam pun terjadi, yaitu terkait dengan pengertian tentang TKLD. Bahkan sempat muncul pertanyaan dari peserta, “Apakah kami sudah TKLD?”. Momen pertemuan reflektif ini menjadi media bagi mitra ACCESS untuk memperoleh penegasan tentang apakah strategi dan kerja-kerja yang telah mereka lakukan berada pada koridor yang disebut menuju Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis sesuai dengan cita-cita perubahan kabupaten yang ingin diwujudkan. Nampaknya, kegelisahan para mitra yang tercermin dari pertanyaan tersebut telah terjawab melalui pertemuan refleksi ini. Jawaban tersebut mereka temukan sendiri dengan panduan yang dikembangkan oleh YAPPIKA untuk mengenali ciri-ciri sebuah kondisi yang disebut TKLD. Sebuah refleksi cukup penting pun muncul di antara peserta, yaitu bahwa tidak ada definisi tunggal tentang TKLD. Kondisi tersebut dapat dikenali dari karakter atau ciri seperti misalnya nilai-nilai akuntabilitas, transparansi dan respon dari pemerintah lokal, meningkatnya peran masyarakat sipil, dan meningkatnya kualitas hidup warga.

Selain menemukan jawaban tersebut, hasil lain dari pertemuan ini diantaranya adalah terumuskannya strategi kerja kolaborasi program diantara mitra ACCESS di Lombok Tengah melalui saling berbagi sumber daya antar mitra. Misalnya Berugak Dese mulai memikirkan bagaimana Forum Posyandu yang dikembangkannya mampu mandiri dan memiliki akses untuk peningkatan ekonomi melalui pengembangan koperasi usaha kecil. Upaya ini dapat lebih efektif jika Berugak Dese bekerja sama dengan ASPPUK yang mempunyai keahlian dalam pengembangan ekonomi usaha kecil. Selama ini, Forum Posyandu hanya melakukan kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS) saja. Demikian pula dengan Mareje Bonga, mereka berharap tidak hanya bekerja dalam isu sumber daya alam tetapi penting memanfaatkan kemampuan ASSPUK dalam meningkatkan ekonomi perempuan di sekitar hutan Mareje Bonga. ■

Setelah memahami pengertian TKLD, maka semakin yakin organisasi sedang bekerja mencapai TKLD. ASPPUK sedang membuka ruang bagi PUK untuk mendapat layanan dari perbankan, itu salah satu mendorong TKLD. ASPPUK diminta untuk menguji calon-calon kepala desa dalam mendorong kesetaraan gender dalam program-program ke depan.

Ririn (ASPPUK)



Memperkuat KAMUKI Papua Barat Community Foundation



"Orang Papua berdaulat atas alamnya, kritis dalam menentukan sikap politik dan bebas dari ancaman bencana ekologis". Pernyataan ini adalah rumusan mimpi bersama Perkumpulan KAMUKI dan mitra kerjanya yang dirumuskan dalam Lokakarya Strategi Advokasi Kreatif Pengelolaan Aset Alam Papua Barat pada tanggal 27-30 April 2010 di Manokwari. Lokakarya advokasi kreatif ini hanyalah bagian dari kegiatan penguatan kapasitas Perkumpulan KAMUKI dan mitra kerjanya yang dilaksanakan YAPPIKA melalui Program Peningkatan Kapasitas OMS dalam Melakukan Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Hutan) Di Provinsi Papua Barat yang didukung oleh Kemitraan.

KAMUKI Papua Barat Community Foundation adalah organisasi sumber daya yang didirikan dalam rangka upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian komunitas masyarakat adat, masyarakat sipil serta organisasinya dalam mendukung tata kelola pemerintahan, secara khusus pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berbasis masyarakat di Provinsi Papua Barat. KAMUKI ada untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat adat untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alamnya, terutama sektor kehutanan. Selain itu juga mendukung

advokasi kebijakan dalam rangka memperluas akses dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumber kekayaan alamnya. Salah satu peran yang dilakukan oleh KAMUKI adalah menggalang sumber daya, baik dana maupun tenaga ahli untuk melayani peningkatan kapasitas OMS mitranya serta mendukung pelaksanaan program-program yang sesuai dengan tujuan pendirian KAMUKI.

Keterlibatan YAPPIKA dalam program tersebut di atas, diharapkan dapat menyumbang pada meningkatnya kapasitas KAMUKI dan para mitranya dalam hal pengelolaan kelembagaan (termasuk keuangan), ketrampilan advokasi serta terbangunnya dialog/debat publik dalam isu pengelolaan sumberdaya alam (hutan). Program berdurasi pendek ini (8 bulan), mempunyai agenda kegiatan yang padat, namun tidak mengurangi antusiasme KAMUKI dan para mitranya untuk terlibat aktif. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah pendampingan pengelolaan keuangan KAMUKI, assessment pengelolaan sumber daya alam di Papua yang melibatkan peneliti dari OMS lokal, memberikan pelatihan mengenai advokasi dan kampanye mendorong kebijakan pengelolaan sumber daya alam kepada OMS mitra KAMUKI, memberikan pelatihan pembuatan desain program menggunakan pendekatan *logical*

framework dan mendampingi para mitra KAMUKI dalam pelaksanaan debat publik yang memuat hasil *assessment* pengelolaan sumber daya alam di Papua.

Beberapa hasil kegiatan cukup menggembirakan. *Assessment* pengelolaan sumber daya alam telah menghasilkan peta visual update terbaru tentang sebaran penguasaan sumber daya alam di Papua. Peta ini telah digunakan oleh KAMUKI dan mitranya sebagai data pendukung yang kuat untuk berdialog dengan pemerintah setempat dalam melakukan advokasi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Papua Barat. Para mitra juga meningkat kapasitasnya dalam melakukan kampanye publik untuk advokasi sumber daya alam yang ditandai dengan terbentuknya *West Papua Creative Campaigner* (WPCC) yang terdiri dari para peserta pelatihan kampanye kreatif. Mereka dapat membuat dan menyampaikan presentasi singkat tentang kondisi sumber daya alam Papua dan usulan-usulan masyarakat sipil yang argumentatif, dikemas dengan bahasa yang menggugah dan didukung oleh data yang akurat. Mereka juga telah berhasil menyusun visi

bersama dengan pencapaian yang bertahap tentang kemanfaatan sumber daya alam Papua yang lestari dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Selain itu, kemampuan beberapa mitra dan pegiat KAMUKI pun meningkat dalam menyusun rancangan program dengan pendekatan *logframe*. Sebuah rancangan program pengelolaan sumber daya alam Papua yang lestari telah dirumuskan bersama antara KAMUKI dan para mitranya.

Kapasitas SDM KAMUKI dan para mitra, data peta penguasaan pengelolaan sumber daya alam Papua serta visi dan gagasan-gagasan program yang telah berhasil dirumuskan bersama tersebut layak didukung oleh berbagai pihak yang peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan pengelolaan yang adil bagi masyarakat Papua. Perubahan memang tidak dapat terjadi dalam sekejap, namun seringkali memerlukan proses yang panjang. Ketahanan, ketegaran dan keseriusan dari masyarakat Papua sendiri dengan dukungan banyak pihak akan menyumbang pada perubahan yang lebih cepat dan adil untuk kehidupan Papua. ■



Membangun Kemandirian Lembaga melalui Penggalangan Dana Publik



Kemandirian finansial lembaga untuk terus mendukung upaya perguliran peran masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuatan negara dan pasar, menjadi perhatian dan perbincangan penting di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Belajar dari keberhasilan lembaga-lembaga zakat dan organisasi internasional yang bekerja di Indonesia dalam menggalang dana publik, sumber daya lokal di Indonesia bahkan di daerah sekalipun mempunyai

potensi untuk memberikan dukungan bagi kerja-kerja kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, penyelamatan lingkungan dan perubahan kebijakan publik. Dalam 2 tahun terakhir ini, penggalangan dana publik telah menjadi salah satu alternatif sumber daya yang mulai serius ditekuni oleh beberapa LSM yang selama ini bergerak di ranah isu advokasi kebijakan publik, gerakan kesetaraan gender dan gerakan anti korupsi. Semangat berbagi pengalaman dan pembelajaran penggalangan dana



publik pun berlangsung di antara LSM-LSM tersebut, termasuk YAPPIKA.

Tahun 2010, YAPPIKA meneruskan upaya penggalangan donasi publik yang telah dirintis bersama Dompot Dhuafa dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun 2009, kali ini YAPPIKA melakukan penggalangan dana untuk mendukung pelaksanaan program yang dikelola oleh YAPPIKA sendiri. Program tersebut adalah keaksaraan fungsional untuk ibu buta aksara di Jakarta Utara dengan tagline “Ayo Bantu 5,3 Juta Ibu Indonesia Belajar Membaca”. Pembelajaran dalam penggalangan dana publik yang diperoleh pada tahun 2009 menjadi dasar pengembangan upaya yang sama tahun ini dengan pendampingan teknis dari Dompot Dhuafa.

Total donasi publik yang terkumpul adalah Rp 95.641.266. Seluruh dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembelajaran keaksaraan fungsional bagi ibu-ibu buta aksara di Kelurahan Marunda dan Sukapura, Jakarta Utara. Para ibu yang berasal dari keluarga miskin ini, mengikuti kelas yang terbagi dalam 10 kelompok belajar

dengan bimbingan relawan YAPPIKA dan relawan lokal yang telah terlatih. Selain baca tulis dan berhitung, para ibu juga dikenalkan dengan konsep hak dasar warga negara, khususnya dalam akses pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan. Sebanyak 100 orang ibu telah memperoleh manfaat dari program ini dan telah menyelesaikan kelas keaksaraan fungsional dasar. Para ibu yang semula buta aksara murni, kini telah bisa membaca, menulis dan berhitung, walaupun beberapa di antaranya belum terlalu lancar baca tulis.

Program ini berlanjut di tahun 2011 dan ibu-ibu yang sudah lulus belajar keaksaraan fungsional dasar pun mengharapkan dan menanti ada kelas belajar lanjutan sehingga mereka dapat lebih lancar baca tulis hitung serta lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan tetangga dan pihak lain. Semakin banyak sumbangan publik maka akan semakin banyak pula ibu-ibu yang terbebas dari buta aksara. Belajar dari penggalangan dana publik tahun 2010, alternatif sumber dana bagi LSM ini layak ditekuni dan dilanjutkan, walaupun tidak mudah untuk mewujudkannya. Kerja keras dan kreativitas menjadi kunci keberhasilan penggalangan dana publik. ■



Mengembangkan Unit Usaha untuk Mendukung Gerakan Anti Korupsi Kisah dari *Malang Corruption Watch* (MCW)



Pertengahan tahun 1999, merupakan tahun bersejarah bagi *Malang Corruption Watch* (MCW). Tahun tersebut merupakan awal proses untuk menginisiasi berdirinya sebuah organisasi non pemerintah yang independen, non partisan tidak berafiliasi kepada kekuatan partai politik, politisi, pejabat publik, pejabat birokrasi maupun pengusaha. Bahkan pada awal diskusi pembentukan, menyeruak beberapa ide. Salah satunya tentang strategi MCW dalam melakukan kerja-kerja advokasi haruslah dengan sokongan dan kemampuan sendiri. Pada saat itu, prinsip dan nilai kolektivitas, keswadayaan, kesukarelawanan menjadi urat nadi bagi MCW, yang kemudian secara resmi dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 2000.

Rentang waktu dari ide pendirian hingga deklarasi memang agak lama. Secara internal pelembagaan gerakan anti korupsi di Malang Raya ini perlu pematangan ide dan strategi agar tidak terjerembab pada sekedar turut hiruk pikuk booming pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh beragam kalangan masyarakat paska reformasi. Para penggagas pendirian MCW perlu berhati-hati agar lembaga anti korupsi yang akan dibentuk benar-benar menjadi organisasi yang berperan bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Disamping itu secara eksternal perlu

berkomunikasi dengan *Malang Corruption Watch* (ICW) yang merupakan salah satu inspirasi pendirian MCW karena mempunyai kesamaan fokus kerja. Gayung bersambut, ICW mendukung gagasan pendirian lembaga anti korupsi baru tersebut sehingga berdirilah MCW sampai saat ini.

Semenjak berdiri hingga pada tahun 2003, seluruh kerja-kerja advokasi MCW melawan korupsi dipikul secara bersama-sama oleh para pendiri maupun pengurusnya. Kerja-kerja ini mulai dari kegiatan investigasi, monitoring, melaporkan kasus korupsi hingga pembiayaan operasional sekretariat. Kampanye gerakan antikorupsi terus dikumandangkan meskipun dengan kemampuan yang terbatas.

Pada akhir tahun 2003, mulailah pengalaman baru MCW bekerja sama dengan YAPPIKA melalui dukungan dana hibah yang bersumber dari *Canadian International Development Agency* (CIDA). Jika sebelumnya MCW hanya sebatas menjadi pelaksana program dari beberapa LSM di Jakarta, bersama YAPPIKA, MCW harus mendesain program, mengajukan proposal dan melaksanakannya sendiri. Keputusan bekerja sama tersebut diambil melalui sebuah proses yang cukup panjang, terutama untuk verifikasi dan klarifikasi terkait dengan 'kebersihan' gerak dan sumber dana YAPPIKA. Proses panjang

tersebut menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan tentang YAPPIKA sebagai lembaga yang bersih dan memiliki perhatian terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi non profit di daerah-daerah dalam rangka memperkuat peran masyarakat sipil.

Selama hampir lima tahun bekerja sama dengan YAPPIKA dalam Program Partnership Program for Development Phase II bertema Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD), MCW sama sekali tidak mengalami persoalan teknis maupun non teknis. Bahkan, dukungan YAPPIKA tidak hanya sebatas pada pelaksanaan program, namun juga diintegrasikan dengan upaya pengelolaan pengetahuan lembaga, melalui penerbitan buku-buku yang terkait dengan substansi, pembelajaran maupun hasil-hasil program yang dilakukan MCW. Dukungan ini secara kreatif dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi sebuah unit usaha penerbitan buku oleh MCW pasca berakhirnya kerja sama dengan YAPPIKA. Kini unit usaha ini mampu membiayai hampir 70% biaya operasional MCW. Bahkan, selain berhasil mengembangkan unit usaha penerbitan buku yang saat ini beromzet Rp 200 juta lebih per tahun, MCW juga berhasil membuka usaha warung makan (kafe) yang menjadi tempat berkumpul aktivis dan mahasiswa di Malang. Walaupun warung makan ini

masih beromzet sekitar Rp 1 – 1.7 juta per bulan, namun perkembangannya cukup menjanjikan, terutama sebagai warung untuk menyemai budaya anti korupsi di kalangan muda Kota Malang

Pilihan model strategi MCW melalui pengembangan unit usaha untuk mendukung kerja-kerja aktivisme ternyata efektif menguatkan kelembagaan MCW terutama dalam menjaga keberlanjutan lembaga maupun proses regenerasi aktivis/relawannya. MCW makin mampu merekrut sumber daya manusia lebih banyak, termasuk melibatkan para relawan dari kalangan mahasiswa karena menguatnya kemampuan financial dari usaha mandiri. Hal ini juga berimplikasi pada semakin besar dan intensifnya peran-peran MCW dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi di Malang Raya. Dan yang tak kalah penting adalah kemandirian ini juga menjadikan seluruh pengurus MCW tetap dapat menjaga semangat idealismenya dan mampu menjauhi godaan-godaan pragmatisme ekonomi maupun politik praktis yang manipulatif. Inilah sebenarnya esensi dari dukungan YAPPIKA dalam membangun dan mendorong kapasitas MCW sebagai organisasi sosial yang tetap independen dan mandiri. Sebuah dukungan yang bermakna bagi MCW. Mari kita mulai belajar dan berbagi untuk merebut perubahan sosial yang lebih baik. ■



Menguatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pertautan (*Engagement*) Konstruktif dan Tata Pemerintahan yang Berpusat pada Warga



Judul tersebut adalah nama program kerja sama antara YAPPIKA dengan (*the International Center for Innovation, Transformation and Excellence in Governance*) INCITEGov Filipina. Kerja sama yang dimulai sejak Oktober 2010 dan berakhir di Mei 2011 ini merupakan kolaborasi tiga negara, yaitu Filipina (INCITEGov, AsiaDHRRA, CODE NGO), Kamboja (STAR Kampuchea), dan Indonesia (YAPPIKA). Tujuan utama program fase kedua ini adalah untuk memperdalam upaya kolektif untuk reformasi tata pemerintahan dengan mengeksplorasi *engagement* dengan pemerintah dan bagaimana OMS sebaiknya meningkatkan dan memaksimalkan ketrampilannya di arena ini. Fase kedua program dirancang berdasarkan pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program fase pertama. Pada fase pertama program dihasilkan sharing pengalaman dan pembelajaran yang sangat kaya, termasuk instrumen/alat-alat *engagement* dari masing-masing negara. Namun sebaliknya, juga memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana OMS

dapat secara efektif menggunakan berbagai pembelajaran dan alat-alat tersebut jika OMS tidak memiliki ketrampilan untuk dapat memanfaatkannya? Apa manfaat berbagai pembelajaran dan alat-alat yang dihasilkan, jika OMS tidak memiliki ketrampilan dan kapasitas untuk menjalankannya?

Berbekal pertanyaan tersebut, program fase kedua ini secara khusus dirancang guna menghasilkan sebuah kurikulum training untuk pertautan konstruktif. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program terdiri dari *roundtable discussion* (RTD) dan *training need assessment* (TNA), serta uji coba kurikulum *training*. Sebanyak 15 aktivis OMS yang bergerak dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional terlibat dalam RTD dan TNA. Dalam RTD, peserta mendiskusikan pengalaman advokasi masing-masing dengan menggunakan strategi *engagement* konstruktif. Menurut peserta yang hadir, dalam konteks advokasi yang mereka jalankan istilah *engagement* kritis dirasa lebih tepat dari pada *engagement* konstruktif. Dengan alasan *engagement* kritis mencerminkan independensi.

Berdasarkan pembelajaran dan berbagai pandangan yang muncul dalam RTD dan TNA, peserta menentukan prioritas kebutuhan *training* mereka. Selanjutnya daftar prioritas tersebut diformulasikan menjadi sebuah program *training* singkat untuk uji coba kurikulum *training* dalam *engagement* konstruktif. Kegiatan uji coba kurikulum *training* sendiri ditujukan sebagai kesempatan peningkatan ketrampilan aktivis OMS yang menjadi peserta, serta



No. : PHHAAF/238/VIE/Ary/2011

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth,
Direktur Eksekutif
YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09
Jakarta Timur 13350

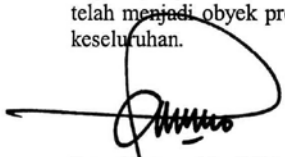
Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen YAPPIKA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Dalam laporan kami tertanggal 14 Juli 2010, kami menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan YAPPIKA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 karena tidak tersedianya surat dari donor mengenai "Pengalihan Hak Milik Aset" atas aset tetap yang tercatat. Sesuai dengan catatan 9 atas laporan keuangan, YAPPIKA telah memperoleh surat "Pengalihan Hak Milik Aset" yang dibutuhkan dari donor terkait. Oleh karena itu, pendapat kami atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, seperti yang disajikan dalam laporan ini, berbeda dengan pendapat yang kami nyatakan pada laporan kami sebelumnya.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAPPIKA tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, hasil aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Penjelasan tambahan terlampir disajikan sebagai analisa tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan.



Drs. Silanto, Ak., MM
Izin Akuntan Publik No. 02.1.0798
Izin usaha KAP No. 1033/KM.1/2009

4 Mei 2011

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan**

Per 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2010	2009
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	4	1.327.981.247	1.452.625.775
Investasi	3b,5	382.031.397	777.502.711
Piutang program - bersih	3c,6	502.176.200	584.307.900
Piutang lain-lain	7	116.360.831	83.014.554
Uang muka	8	40.358.994	100.215.896
Jumlah aset lancar		2.368.908.669	2.997.666.836
Aset tidak lancar			
Aset tetap	3d,9		
Nilai perolehan		688.191.941	565.591.941
Akumulasi penyusutan		554.088.531	(554.550.178)
Jumlah aset tidak lancar		134.103.410	11.041.763
Jumlah aset		2.503.012.079	3.008.708.599

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2010	2009
Kewajiban dan aset bersih			
Kewajiban			
Kewajiban lancar			
Hutang lain-lain	10	177.558.966	215.388.137
Hutang pajak	11	4.109.813	2.688.929
Jumlah kewajiban lancar		181.668.779	218.077.066
Aset bersih			
Sisa dana	3e		
Terikat	12a	96.295.700	(76.407.933)
Tidak terikat	12b	2.225.047.600	2.867.039.466
Jumlah aset bersih		2.321.343.300	2.790.631.533
Jumlah kewajiban dan aset bersih		2.503.012.079	3.008.708.599

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan Aktivitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2010		2009	
		Terikat	Tidak terikat	Jumlah	Jumlah
Penerimaan	13				
Penerimaan program		1.611.752.644	-	1.611.752.644	5.486.089.016
Penerimaan lain-lain		-	1.014.344.329	1.014.344.329	1.869.659.322
Jumlah penerimaan		1.611.752.644	1.014.344.329	2.626.096.973	7.355.748.338
Pengeluaran	14				
ACCESS Tahap II – Task Note II		468.085.675	-	468.085.675	-
Partnership for Governance Reform in Indonesia		364.050.910	-	364.050.910	-
Yayasan TIFA		331.726.032	-	331.726.032	-
ACCESS Tahap II – Workshop MP3		92.415.900	-	92.415.900	-
ACCESS Tahap II – Capacity Building		72.077.500	-	72.077.500	-
Program Keaksaraan Fungsional		51.081.920	-	51.081.920	-
Yayasan TIFA – WFDA Binneal Meeting in Seoul		11.754.327	-	11.754.327	77.445.726
INCITEGov, Inc		10.600.000	-	10.600.000	-
Canadian International Development Agency (CIDA)		-	-	-	-
melalui USC Canada - CSO (Capacity Building in Aceh)		-	-	-	3.147.781.768
ACCESS Tahap II		-	-	-	2.251.899.619
The Asia Foundation – CSIAP II		-	-	-	489.441.336
The British Embassy Jakarta		-	-	-	220.104.265
Taiwan Foundation for Democracy		-	-	-	191.317.574
United Nations Development Programme (UNDP) - Assessment on International Assistance in Election 2009		-	-	-	39.081.500
Yayasan TIFA - Advokasi Pelayanan Publik		-	-	-	30.370.965
Administrasi		-	1.656.336.195	1.656.336.195	922.572.071
Jumlah pengeluaran		1.401.792.264	1.656.336.195	3.058.128.459	7.370.014.824

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
Laporan Aktivitas (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
 (Dalam Rupiah)

	Catatan	2010		2009	
		Terikat	Tidak terikat	Jumlah	Jumlah
Sisa dana, tahun berjalan		209.960.380	(641.991.866)	(432.031.486)	(14.266.486)
Sisa dana, awal		(76.407.933)	2.867.039.466	2.790.631.533	2.812.402.569
Pengembalian dana ke donor	12	(37.256.747)	-	(37.256.747)	(7.504.550)
Sisa dana, akhir		96.295.700	2.225.047.600	2.321.343.300	2.790.631.533

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah)

	2010	2009
Arus kas dari aktivitas operasi		
Sisa dana, tahun berjalan	(432.031.486)	(14.266.486)
Penyesuaian untuk rekonsiliasi sisa dana ke kas yang digunakan untuk aktivitas operasi		
Koreksi atas sisa dana	(37.256.747)	(7.504.550)
Penyusutan	45.988.353	7.478.565
Laba (rugi) investasi yang belum direalisasi	395.471.314	(396.503.361)
Penurunan (kenaikan) pada:		
Piutang program	82.131.700	15.932.200
Piutang lain-lain	(33.346.277)	13.124.020
Uang muka	59.856.902	486.715.866
Kenaikan (penurunan) pada:		
Hutang lain-lain	(37.829.171)	(186.945.654)
Hutang pajak	1.420.884	2.611.835
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	44.405.471	(79.357.565)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Perolehan aset tetap	(4.050.000)	(10.015.910)
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.050.000)	(10.015.910)
Penurunan dalam kas dan setara kas	(124.644.528)	(89.373.475)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	1.452.625.775	1.541.999.250
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	1.327.981.247	1.452.625.775